

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basah, S. (1995). *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djajadiningrat, S. I. (1960). *Hukum Pajak dan Keadilan*. Bandung: Eresco.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2004). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Murdani, B. (2024). *Pajak & Kepastian Hukum (Filosofis, Teoritis, Praktis)*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Pamungkas, P. K. (2006). *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. d. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Tingkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (1964). *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, R. (2008). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, R. d. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika

Aditama.

- Sri Hajati, e. (2008). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono. (2019). *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*. Jakarta: Kencana.
- Sumyar. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tjandra, R. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tjandra, R. (2015). *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Aju Putrijanti, dkk, "Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 2, Juni 2017
- Bambang Heriyanto, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, 2018
- Dian Agung, Bima Fajar Hantoro, Dedy Kurniawan. "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtsvinding* (2021)
- Irvansyah, Andika Risqi. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* (2022)
- Ispiyarso, Budi, "Upaya Hukum dalam Sengketa Pajak", *Administrative Law & Governance Journal* Vol.1 Edisi 2, 2018.
- Ridwan HR, Despan Heryandayah, Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (2018)
- Simanjuntak, E. Prospek Prinsip Fiktif Positif dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2018).
- Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Nurani Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018
- Reijo Raivola, "What is Comparison? Methodological and Philosophical

Considerations”, *Comparative Education Review*, Vol. 29, No.3, 1985.

Rodiing, Budiawan. "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Pelayanan Publik." *Tanjungpura Law Journal* (2017)

Yuliani, Erlin Triatha. "Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya." *University of Bengkulu Law Journal* (2020):

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380); dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 jo No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Yurisprudensi

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000;

Putusan Pengadilan No. 60/G/2019/PTUN.SBY; Putusan ini berisi gugatan dari CV. Mitra Abadi Logistik terhadap Kepala KPP Pratama Gresik atas diterbitkannya SPT dan SKP terhadap CV. Mitra Abadi; hakim menjatuhkan amar putusan yang mengabulkan gugatan CV. Mitra Abadi.

Putusan Pengadilan No. 290/B/2019/PT.TUN.SBY; putusan ini merupakan permohonan banding atas putusan 60/G/2019/PTUN.SBY; di mana hakim memiliki pertimbangan hakim yang bertentangan dengan putusan 60/G/2019/PTUN.SBY dan menjatuhkan amar putusan kabul terhadap gugatan banding tersebut yang membatalkan putusan 60/G/2019/PTUN.SBY.

Putusan Pengadilan No. 42/PDT/2022/PN.Kla jo No. 24/PDT/2022/PT TJK; putusan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh

Kepala KPP Pratama Natar atas diterbitkannya SKP dan penyanderaan harta benda wajib pajak; hakim menjatuhkan amar putusan kabul dan menguatkan putusan tingkat pertama.

Putusan pengadilan No. 49/G/2023/PTUN.BDG; putusan ini merupakan putusan hakim PTUN yang menolak gugatan atas SKP yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Ciamis dengan pertimbangan kompetensi absolut PTUN.

Website / Internet

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>